



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
PADANG PANJANG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN	
PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan I	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	43
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	50
2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2025	55
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	68
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL	
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK	69
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	69
3.3 Program dan Kegiatan	85
 BAB V PENUTUP	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.4	Target pencapaian SPM sampai dengan triwulan I tahun 2025
Tabel. 2.5	Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Tabel 2.6	Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku kepentingan Tahun 2025 Kota Padang Panjang
Tabel 3.1	Rekap Jumlah Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.2	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Melalui Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dengan perencanaan di atasnya serta peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait hal tersebut, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang perlu merancang pelaksanaan tugas-tugasnya agar lebih jelas dan terukur. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai wujud penjabaran / pelaksanaan dari RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan digunakan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya program kerja yang selaras, serta didukung oleh kesamaan referensi dan persepsi dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang , maka diharapkan ini bisa menjadi acuan dan referensi bagi pengembangan rencana kerja operasional dari seluruh komponen penyelenggara fungsi pembinaan kesatuan bangsa dan pembangunan politik.

Sehingga nantinya dapat diterima sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Panjang.Padang Panjang, Juni 2025

**Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang**



Drs. OSMAN BIN NUR, M,Si
Penata Muda Utama NIP 196901201989021001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga apemerintah di daerah, maka dalam system perencanaan pembangunan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi yang saling terkait antara perencanaan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka diamanatkan bagi daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dalam upaya pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari suatu perencanaan, baik perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun yang bersifat perencanaan tahunan (RKP). Berkaitan dengan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD

serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengamanatkan Bupati/Walikota mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya menyusun Rancangan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program prioritas yang disampaikan/disosialisasikan pada waktu menjadi Calon Walikota serta paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berkenaan dengan amanat tersebut Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra yang dituangkan dalam setiap tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilaksanakan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta kebijakan nasional maupun provinsi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Melalui Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas

Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dengan perencanaan di atasnya serta peraturan perundangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Secara legalitas formal, penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 ini didasarkan antara lain kepada :

- a. Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
- b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW);
- d. Undang Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- i. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

- j. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- k. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- l. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- m. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- n. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- o. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- s. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

- t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- u. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 umumnya mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045
- v. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ;
- w. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
- x. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Perubahan Kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.
2. Menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program kegiatan agar selaras dengan program tahunan daerah
3. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta perubahan teknis lainnya seperti penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran sub kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK

- 2.1 Evaluasi Perubahan Renja Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 sd Triwulan I
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD tahun 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN DINAS DINAS SOSIAL
PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUGAN ANAK

3.1 memperhatikan telaahan terhadap kebijakan
Nasional/Provinsi PD serta narasinya

3.2 Memperhatikan Tujuan Sasaran Rencana Kerja OPD serta
narasinya

3.3 Program dan Kegiatan (memperhatikan narasi serta
Program /Kegiatan Perubahan RKPD PD 2025)

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 pada Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai Triwulan I tahun 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja sampai Triwulan I tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian target Tahun 2025 berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melaksanakan 3 (tiga) urusan Wajib yang terdiri dari Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan struktur organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang terdiri dari empat bidang dan satu secretariat..

Rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sampai triwulan I Tahun 2025 adalah 26 % dengan target 17 % Namun masih terdapat beberapa subkegiatan dengan realisasi keuangan dibawah dibawah target. Realisasi pelaksanaan rencana kerja per urusan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang**

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T			
										I	II	III	IV											
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	
	Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja Organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	15.901.884.786	100 %	6.707.350.978	100		100	5.204.350.724							100	5.204.350.724	100	33	100 %	5.142.969.762	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %	12.167.792.646	100 %	5.486.289.035	100		100	-							100	-	100 %	4.055.930.882			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	1554 Orang/bul an	12.167.792.646	560 Orang/bulan	5.486.289.035	144	1.489.412.197	144	1.229.496.302							144	1.229.496.302	144	10	518 Orang/ bulan 0 %	4.055.930.882	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	36.500.000	100 %	17.850.000	100		100	-							100	-	100	-	0 %	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	36.500.000	40	17.850.000	0	-	0	-							-	-	-	-	0 Paket	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	898.224.100	100 %	290.706.177	100		100	898.224.100							100	898.224.100	100	100	100 %	333.916.200	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor yang disediakan	15 Jenis	16.175.100	4 Jenis	5.354.000	4	1.000.000	4	255.000							4	255.000	4	2	5 Jenis	5.391.700	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	21 Paket	195.000.000	4 Paket	42.705.250	4	29.000.000	4	4.572.000							4	4.572.000	4	2	7 Paket	65.000.000	

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Kantor yang Disediakan																							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	58.999.000	12 Paket	7.951.100	1	7.000.000	1	2.969.800							1	2.969.800	1	5	4 Paket	24.499.500			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	616.050.000	24 Laporan	234.695.827	3	98.250.000	3	47.396.392							3	47.396.392	3	8	24 Laporan	233.025.000			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	2 Dokumen	12.000.000	-	67.046.000	0		0	-							-	-	-	-	1 Dokumen	6.000.000			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	600.000.000	100 %	67.046.000	100		100	600.000.000							100	600.000.000	100	100	100 %	20.000.000			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	0 Unit	100.000.000	13 Unit	67.046.000	13	18.549.000	13	-							13	-	13	-	5 Unit	20.000.000			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit					-							-	-	-		0 Unit	-			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	500.000.000	-					-							-	-	-	-	0 Unit	-			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	0 Unit					-							-	-	-		1 Unit	-			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	1.566.545.040	100 persen	674.145.930	100		100	1.566.545.040							100	1.566.545.040	100	100	100 %	522.181.680			

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I		II		III		IV										
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		14	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	161.681.040	36 Laporan	30.612.930	3	11.400.000	3	7.723.901							3	7.723.901	3	5	3 Lapora n	53.893.680			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.404.864.000	12 Laporan	643.533.000	3	196.450.000	3	184.132.000							3	184.132.000	3	13	4 Lapora n	468.288.000			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	632.823.000	100 %	171.313.836	100		100	632.823.000							100	632.823.000	100	100	100 %	210.941.000			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63 Unit	334.575.000	21 Unit	109.757.436	21	34.065.600	21	20.105.689							21	20.105.689	21	6	21 Unit	111.525.000			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	106.548.000	27 Unit	33.299.400	27	51.400.000	27	5.727.500							27	5.727.500	27	5	27 Unit	35.516.000			
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin yang Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	165 Unit	71.700.000	55 Unit	8.790.000	55	6.000.000	55	4.030.000							55	4.030.000	55	6	55 Unit	23.900.000			
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	120.000.000	6 unit	19.467.000	6	20.142.000	6	350.000							6	350.000	6	0	6 Unit	40.000.000			
	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	85 %	3.609.039.100	75 Persen	1.363.089.575	75		75	110.686.453							75	110.686.453	75	3	80 %	1.269.679.700			

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KE T	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13		14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	444 Lembaga	3.609.039.100	60 Lembaga	1.363.089.575	60		60	-							60	-	60	-	148 Lemba ga	1.269.679.700		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	276 Orang	801.668.400	92 Orang	279.579.650	92	61.241.300	92	47.520.000							92	47.520.000	92	6	92 Orang	267.222.800		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	25.920.000	2 Orang	4.800.000	2	1.600.000	2	-							2	-	2	-	2 Orang	8.640.000		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Lembaga	2.500.000.000	60 Lembaga	981.356.148	60	127.896.000	60	45.666.453							60	45.666.453	60	2	60 Lemba ga	900.000.000		
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	15 Sertifikat	281.450.700	2 Sertifikat	97.353.777	2	29.808.300	2	17.500.000							2	17.500.000	2	6	5 Sertifikat	93.816.900		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Tertangani	90 %	2.620.675.456	90 %	800.960.807	90		90	297.553.126							90	297.553.126	90	11	90 %	873.711.400		

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I		II		III		IV												
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2250 Orang	1.499.541.256	500	492.033.690				-							-	-	-	-	750 Orang	500.000.000					
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1377 Orang	600.000.000	285	144.729.544	210	199.930.450	210	121.847.626							210	121.847.626	210	20	459 Orang	200.000.000					
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	225 Orang	450.000.000	499	216.659.600	210	145.680.000	210	84.646.500							210	84.646.500	210	19	75 Orang	150.000.000					
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	66 Orang	240.000.000	15	62.906.500	9	12.882.000	9	22.590.750							9	22.590.750	9	9	22 Orang	80.000.000					
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabunaten/Kota	150 Orang	149.541.256	50 Orang	25.683.796	7	19.206.666	7	2.159.500							7	2.159.500	7	1	50 Orang	50.000.000					

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I		II		III		IV									
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		14
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150 Orang	60.000.000	50 Orang	42.054.250	63	11.000.000	63	5.475.000						63	5.475.000	63	9	50 Orang	20.000.000			
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhannya diluar panti	2792 Orang	1.121.134.200	100	308.927.117	100		100	-						100	-	100	-	2710 Orang	373.711.400			
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	225.000.000	400	26.213.713	25	11.600.000	25	13.493.750						25	13.493.750	25	6	75 Orang	75.000.000			
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	225.000.000	400	49.342.179	19	6.260.000	19	12.320.000						19	12.320.000	19	5	75 Orang	75.000.000			
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	15 Orang	30.000.000	5	7.847.000	4	6.170.000	4	5.700.000						4	5.700.000	4	19	5 Orang	10.000.000			

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T		
										I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.									K	Rp.
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		14
			Kewenangan Kabupaten/Kota																								
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	360.000.000	25	134.072.525	150	6.850.000	150	6.590.000							150	6.590.000	150	2	30 Orang	120.000.000				
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Dokumen	281.134.200	2	91.451.700	0	20.569.870	0	22.730.000							-	22.730.000	-	8	10 Dokum en	93.711.400				
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	684.088.800	86,98 Persen	463.563.903				16.789.000							-	16.789.000	-	2	87,97 %	228.029.600				
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	42 Layanan	684.088.800	8 layanan	463.563.903				-							-	-	-	-	17 Layana n	228.029.600				
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	6357 Orang	237.960.000	1749 orang	79.548.600		40.435.600		3.037.000							-	3.037.000	-	1	2119 Orang	79.320.000				
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3605 Keluarga	401.128.800	1142 Keluarga	384.015.303	114 2	16.264.600	114 2	13.752.000							1.14 2	13.752.000	1.14 2	3	1271 Keluarg a	133.709.600				
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan	390 Orang	45.000.000	0 Orang	-	0	-	0	-							-	-	-	-	130 Orang	15.000.000				

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T		
										I		II		III		IV														
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11				12				13		14		
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
			Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																											
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	460.509.957	100 %	165.138.000				10.566.250						-	10.566.250	-	2	100 %			153.503.319						
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 %	240.000.000	100 %	165.138.000				-						-	-	-	-	100 %			80.000.000						
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	900 Orang	90.000.000	500	15.218.950	0	-	0	-						-	-	-	-	300 Orang			30.000.000						
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakai dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	900 Orang	90.000.000	200	6.096.000	0	10.000.000	0	6.400.000						-	6.400.000	-	7	300 Orang			30.000.000						
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	900 Orang	60.000.000	150	4.468.000	0	-	0	-						-	-	-	-	300 Orang			20.000.000						

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I		II		III		IV										
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12				13		14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	30 Orang	Rp.	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	90 Orang	220.509.957	30 Orang	139.355.050				-							-	-	-	-	30 Orang	73.503.319			
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90 Orang	220.509.957	30 Orang	139.355.050	30	22.218.000	30	4.166.250						30	4.166.250	30	2	30 Orang	73.503.319				
			Pemeliharaan dan rehab bangunan markas komando TAGANA	1 Unit		1 Unit	-				-						-	-	-		0 Unit					
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100 %	75.000.000	100 %	24.542.000				-						-	-	-	-	100 %	25.000.000				
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah makam yang dipelihara	294 Makam	75.000.000	98 Makam	24.542.000				-						-	-	-	-	98 Makam	25.000.000				
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	294 Makam	75.000.000	98 Makam	24.542.000	98	508.600	98	-						98	-	98	-	98 Makam	25.000.000				
						-	-				-						-	-	-			219.580.000				
	Meningkatk an pembangun an pemberday aan perempuan dan anak					-	-				-						-	-	-							
		PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif	100 Persen	648.740.000	100 Persen	161.100.162				11.297.850						-	11.297.850	-	2	100 Persen	40.000.000				

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I		II		III		IV												
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		14	
			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Persen		20 Persen	-				-						-	-	-		20 Persen							
		Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	69 OPD	110.000.000	23 OPD	53.069.251				-						-	-	-	-	23 OPD	40.000.000						
			Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	69 OPD		23 OPD	-				-							-	-	-		23 OPD	30.000.000					
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Perangkat Daerah	110.000.000	23 Perangkat Daerah	53.069.251	23	26.861.400	23	9.795.350						23	9.795.350	23	9	23 Perangkat Daerah	30.000.000						
		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 %	90.000.000	50 %	6.759.200	50			-						-	-	-	-	50 %	149.580.000						

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KE T			
										I	II	III	IV											
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K		14
		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	78 Lembaga	90.000.000	26 Lembaga	6.759.200	26	1.271.150		-						-	-	-	-	26 Lemba ga			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 persen	448.740.000	100 Persen	101.271.711			-							-	-	-	-	100 persen	149.580.000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi danPendampingan (Lembaga)	12 Lembaga	-	15 Dokumen	-		-		-						-	-	-		12 Lemba ga	149.532.000		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	45 Dokume n	448.740.000	15	101.271.711	3	19.400.000	3	1.502.500						3	1.502.500	3	0	15 Dokum en	30.000.000		
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan	100 BTJ	463.566.000	1	262.779.926				18.172.500						-	18.172.500	-	4	100 BTJ	30.000.000		

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T	
										I	II	III	IV									
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	14
			pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu																			
		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	24 Lembaga	100.000.000	8 Lembaga	60.142.125			-						-	-	-	-	8 Lemba ga	104.502.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Dokume n	100.000.000	6 Dokumen	60.142.125	1	5.071.200	-						-	-	-	-	6 Dokum en	104.502.000	
		Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 %	313.506.000	100 Persen	83.717.801			-						-	-	-	-	100 %	15.030.000	
		Koordinasi dan sinkronisasi tindakan lanjut pengaduan yang memerlukan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	34 layanan	313.506.000	10 Layanan	83.717.801	12	34.993.750	12	18.172.500					12	18.172.500	12	6	12 layana n	15.030.000	
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	30 Layanan	50.060.000	10 Layanan	118.920.000			-						-	-	-	-	10 Layana n	120.620.000	

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14
		perempuan tingkat daerah																											
	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	45 Dokumen	50.060.000	15 Dokumen	83.791.500				-							-	-	-	-	15 Dokumen	43.855.000						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 %	353.005.000	80 Persen	141.884.885				36.539.000							-	36.539.000	-	10	83 %	43.855.000						
		Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	105 Lembaga	122.710.000	30 Lembaga	49.428.250				-							-	-	-	-	35 Lembaga							
		Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	45 Dokumen	122.710.000	15 Dokumen	49.428.250	1	737.700		-							-	-	-	-	15 Dokumen	76.765.000						
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	90 Organisasi	-	30 Organisasi	-				-							-	-	-	-	30 Organisasi							
		penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan	Persentase forum anak aktif	80 persen	230.295.000	50 Persen	92.456.635				-							-	-	-	-	70%							

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I		II		III		IV										
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	14	
		kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota																								
			Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	100 Persen		100 Persen	-				-						-	-	-		100 Persen	76.765.000				
			Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100 Persen		100 Persen					-						-	-	-		100 Persen					
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	105 Orang	230.295.000	35 Orang	92.456.635				-						-	-	-	-	35 Orang	262.137.000				
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1	37.182.100	1	36.539.000						1	36.539.000	1		1 Dokum en	62.137.000				
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	823.836.000	1	257.745.387				21.852.570						-	21.852.570	-	3	100 BTJ	22.137.000				
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	30 Lembaga	186.411.000	100 persen	117.395.340				-						-	-	-	-	30 Lemba ga	40.000.000				

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I	II	III	IV												
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		14
		para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota																							
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	66.411.000	10 Orang	87.593.790	5	16.391.600	4.843.320						-	4.843.320	-	7	10 Orang	160.000.000				
		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	4 Dokumen	120.000.000	-	29.801.550	1	6.862.500	1	1.532.000					1	1.532.000	1	1	6 Dokumen	40.000.000				
		Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 %	472.425.000	100 %	98.449.300			-						-	-	-	-	100 %	120.000.000				
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	34 Orang	107.125.000	10 Orang	26.256.000	12	12.390.000	10	-					10	-	10	-	12 Orang	40.000.000				
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	34 Orang	365.300.000	12 Orang	72.193.300		46.278.250	15.477.250						-	15.477.250	-	4	12 Orang	40.000.000				
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang mengikuti penguatan dan pengembangan kapasitas	24 Lembaga	165.000.000	8 Lembaga	41.900.747			-						-	-	-	-	8 Lembaga	78.000.000				

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I	II	III	IV															
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	14
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	165.000.000	10 Orang	41.900.747	5		5	-							5	-	5	-	10 Orang	28.000.000					
						-	-				-							-	-	-			23.000.000					
	Meningkatk an pelayanan kependuduk an dan Keluarga Berencana					-	-				-							-	-	-			-					
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	387.100.000	100 %	86.664.235				3.193.500							-	3.193.500	-	1	100 %	5.000.000					
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	111.000.000	1 Dokumen	15.279.950				-							-	-	-	-	1 Dokum en	50.000.000					
		Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	75 Kegiatan	66.000.000	1 kegiatan	15.279.950	1			-							-	-	-	-	25 Kegiat an	-					
		Sosialisasi tentang Pemanfaatan kajian tentang dampak kependudukan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan	40 Organisasi	-	-	-	40			-							-	-	-	-	40 Organi sasi	30.000.000					

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T			
										I	II	III	IV											
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		14
		beserta model solusi strategi sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan.	Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																					
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	60 Satuan Pendidik an	45.000.000	-	-	20			-						-	-	-	-	12 Dokum en	20.000.000		
		Pemetaan Perkiraan pengendalian Penduduk cakupan daerah Kabuapten/kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	48 Unit	276.100.000	16 unit	71.384.285				-						-	-	-	-	16 Unit	745.440.001		
		pengolahan dan pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36 Dokumen	126.100.000	12 Dokumen	23.925.480	3	3.859.200	3	3.193.500						3	3.193.500	3	3		55.000.000		
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kenependudukan	48 Unit	90.000.000	16 Unit	30.928.565	16		16	-						16	-	16	-		0		

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I		II		III		IV											
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		14
			dan Keluarga Berencana) diSektor Lain yang Dibentuk																								
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	19.400.000	3	2.400.000	3	-							3	-	3	-	12 Lapora n	40.000.000				
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR	67 %	1.856.568.250	62 Persen	1.171.506.159	50			8.942.520							-	8.942.520	-	0	65 %	15.000.000				
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2434 Orang	182.900.000	2287 orang	479.389.112	1050			-							-	-	-	-	2450 Orang	167.880.000				
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	17.900.000	4 Laporan	139.779.915	1	19.275.815	1	8.942.520							1	8.942.520	1	50	4 Lapora n	30.000.000				
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	21 Dokumen	120.000.000	-	-		8.470.000		-							-	-	-	-	7 Dokum en	137.880.000				
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	90 Organisasi	45.000.000	-	151.742.420	30			-							-	-	-	-	30 Organi sasi	56.000.000				

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025				TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T		
										I		II		III		IV														
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11				12				13		14		
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
			dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																											
		Pendayaangunaan Tenaga Penyuluh KB (Petugas Lapangan KB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	297 Orang	503.640.000	-	250.449.997	99		-								-	-	-	-	99 Orang	56.000.000							
		Penggerakan Kader Institusi masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	264 Orang	90.000.000	-	46.200.000	88	12.800.000	-								-	-	-	-	88 Orang	1.095.120.001							
		Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan olehPKB/PLKB	40 Organisasi	413.640.000	-	204.249.997	40	37.720.000	-								-	-	-	-	40 Organisasi	552.560.001							
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat tingkat Daerah Kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50 persen	166.908.250	50 persen	-	50		-								-	-	-	-	50 %	30.000.000							
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelavanan dan	9 Organisasi	166.908.250	-	-		15.530.000	-								-	-	-	-	3 Organisasi	522.560.000							

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4				REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I		II		III		IV											
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		14
			Pembinaan Kesertaan Ber-KB																								
	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stuntin	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	67 %	3.462.414.000	62 Persen	1.018.190.811				40.563.175						-	40.563.175	-	1	65 %	1					
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	342 Kelompok	1.772.680.000	102 kelompok	274.456.812	114			-					-	-	-	-	114 Kelompok	-						
		Promosi dan sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	9 Laporan	205.000.000	3 Laporan	122.620.812	1			-					-	-	-	-	3 Laporan	542.560.000						
		Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	669 Kader	1.567.680.000	-	-	223	93.660.000		-					-	-	-	-	223 Kader	522.560.000						

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T			
										I	II	III	IV											
1	2	3	4			K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	14
		Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksana/Kader Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	4 Laporan	-	-	-	1			-						-	-	-		4 Lapora n	20.000.000		
		Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Unit	151.836.000				-						-	-	-		Unit			
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100 %	1.689.734.000	366.428.000	743.733.999				-						-	-	-	-	100 %			
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, RKL, PPPKS, PIK-R	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan	69 Organisa si	1.629.734.000	23 Organisasi	492.733.999	23	101.234.400		40.563.175						-	40.563.175	-	2	23 Organi sasi			

N O	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KE T
										I	II	III	IV												
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14	
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																						
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargabagi Mitra Kerja	1 Laporan	60.000.000	-	-		-		-							-	-	-	-	1 Lapora n			

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan I Tahun 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan: 24 % realisasi fisik : 24 %
 - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi keuangan: 0 % realisasi fisik : 0 %
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi keuangan: 16 % realisasi fisik : 16 %
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi keuangan: 16 % realisasi fisik : 16 %
2. Program Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 9% realisasi fisik : 9%
3. Program Rehabilitasi Sosial
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan realisasi keuangan: 37 % realisasi fisik : 37%
 - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan realisasi keuangan: 14 % realisasi fisik : 14 %
 - c.
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 8 % realisasi fisik : 8%
5. Program Penanganan Bencana
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 40 % realisasi fisik : 40 %
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap

- Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0-% realisasi fisik : 0%
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0-% realisasi fisik : 0-%
 7. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 13 % realisasi fisik : 13%
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0 % realisasi fisik : 0%
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 1% realisasi fisik : 1%
 8. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 19% realisasi fisik : 19%
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
 9. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 27% realisasi fisik : 27%
 10. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para

Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan:
4 % realisasi fisik : 4%

- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%

11. Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 4% realisasi fisik : 4%

12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan realisasi keuangan: 6% realisasi fisik : 6%
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 3% realisasi fisik : 3%
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
- e. Ber-KB dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%

13. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi keuangan: 13% realisasi fisik : 13%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Tahun 2024 Di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang (LPPD) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran yang dirumuskan di dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun 2025-2029. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pemerinta nmor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Dalam LPPD, akuntabilitas yang dijabarkan terdiri dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2023, capaian kinerja dari 24 indikator kinerja yang diukur, 12 indikator melebihi target yaitu, Prevalensi *Stunting*, Angka PPKS, sementara masih ada 1 indikator yang belum bisa diukur karena belum diketahui realisasinya. Indikator yang belum bisa diukur dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai ini baru dirilis dalam portal BPS Provinsi Sumatera Barat setelah Laporan Kinerja Tahun 2022 dikirimkan. Nilai IDG Kota Padang Panjang Tahun 2022 adalah 67,82 masih kurang 1,62 dari target dengan capaian 97,67%. Dari 24 indikator kinerja pada tahun 2022, sebanyak 11 indikator capaiannya telah melebihi target akhir RPJMD yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, capaiannya tidak hanya melebihi target yang ditetapkan tahun 2022 saja, bahkan telah melebihi target akhir RPJMD.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing Urusan Pemerintahan dan Urusan Penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap. Pada Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibagi menjadi 3 indikator, yaitu:

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (merupakan Indikator Kinerja Kunci Output yang berasal dari indikator Kinerja Kunci Outcome pada masing-masing urusan);
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (merupakan Indikator Kinerja Kunci Outcome pada masing-masing urusan), dan
3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Untuk melihat pencapaian dari masing-masing indikator (Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-				Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2025	2026	
1	Angka PPKS		IKK	5.85	5.56	4.68	4.49	4.30	5.43	4.47	3,69		4.49	4.30	
2	Persentase PPKS yang tertangani		IKK	60	65	80	82.5	85	69.82	92	97		82.5	85	
3	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif		IKK	90	90	100	100	100	90	100	100		100	100	
4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif		IKK	100	100	100	100	100	75	75	100		100	100	
5	Persentase lansia terlantar yang tertangani	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
7	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
8	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
9	Persentase penurunan KK miskin		IKK	3.5	4				13.17	-					
10	Persentase korban bencana yang tertangani	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
11	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		IKK	81.7	83.1	71.44	73.05	75.06	69.44	67,58	75,62		73.05	75.06	
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		IKK	98.6	98.61				98.24	98,19	98,23				
14	Predikat APE		IKK	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Pratama	Pratama	Pratama		Nindya	Nindya	
15	Persentase ARG terhadap APBD		IKK	5	6				8.75	6	15.38				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-				Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2025	2026	
16	Persentase organisasi perempuan aktif		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
17	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
18	Tingkat capaian Kota Layak Anak		IKK	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama	Nindya	Nindya	Utama		Utama	Utama	
19	Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar		IKK	70	75	83.5	87	90	79.85	75	80		87	90	
20	Persentase forum anak yang aktif		IKK	47.4	52.63	83,5	87	90	47.4	53	80		87	90	
21	Persentase kasus anak korban kekerasan yang terselesaikan		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
22	TFR (Total Fertility Rate)		IKK	2.46	2.44	2,35	2,3	2,25	2.54	2.51	2,43		2,3	2,25	
23	Rata-rata jumlah anak perkeluarga		IKK	2.25	2.2	2,35	2,3	2,25	2.4	2.51	2,43		2,3	2,25	
24	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
25	Unmeet Need		IKK	22.8	22.5	22,5	22,3	22	25.42	20.51			22,3	22	
26	Prevalensi Stunting		IKK	16	15.5	14,00	12,60	11,20	14.76	15.03	9,49		12,60	11,20	
27	Persentase keluarga sasaran tribina yang ber KB		IKK	60.75	70.55	70.75	70.80	70.90	44.93	89.46	61		70.80	70.90	
28	Persentase kelompok PIK R yang aktif		IKK	73	75	75	75	75	73	75	75		75	75	
29	Persentase PUS keluarga sasaran BKB yang memperoleh pendampingan 1000 HP kelahiran		IKK	50	100	70	72.5	75	50.91	88	74		72.5	75	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-				Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2025	2026	
30	Persentase kelompok PIK Remaja yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu		IKK	100	100	100	100	100	100	90	90		100	100	

Tabel, 2.3
Capaian Indicator Kinerja Kunci Keluaran
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	NO IKK	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
URUSAN	OUTCOME			KINERJA	
1		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1		-
2		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1		-
3		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0		-
4		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	410		-
5		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2		-
6		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket	410		-
	1.f.1	permakanan sesuai standar gizi			
7		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1		-
8		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	379		-
9		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	35		-
10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0		-
11		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1		-
12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0		-
13		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0		-
14		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2		-
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan	143		-
15		bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			

NO	NO IKK	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
URUSAN	OUTCOME			KINERJA	
16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	33	-	-
17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1	-	-
18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	7	-	-
19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	5	-	-
20		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan Keluarga	16	-	-
21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	8	-	-
1		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	217	-	-
2		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	60	-	-
3	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	-	-
4		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	11	-	-
5		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	18	-	-
6		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	28	-	-

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Di pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sebagai implemetasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah masalah kesejahteraan sosial yang di tetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah di tetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial RI

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Kota Padang Panjang.

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial untuk Tahun 2025 tertuang dalam program Rehabilitasi Sosial meliputi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Program Penangan Bencana dengan kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota. SPM Bidang Urusan Sosial mencakup Pelayanan dasar yaitu :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - e. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Pelayanan Dukungan Psikososial
 - d. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Target pencapaian SPM sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target pencapaian SPM sampai dengan triwulan I tahun 2025

No	Sub kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode Renstra (2026)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s.d Triwulan I 2025		Persentase Tingkat Capaian	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	750	646.099.545	499	236.719.376	66,53	36,64
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	459 Orang	459	376.199.545	210	121.847.626	45,75	32,39
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75 Orang	75	150.000.000	210	84.646.500	280,00	56,43
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22 Orang	22	55.900.000	9	22.590.750	40,91	40,41
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50	44.000.000	7	2.159.500	14,00	4,91
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50 Orang	50	20.000.000	63	5.475.000	126,00	27,38
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 %	100	26.500.000	0	6.400.000	0,00	24,15

No	Sub kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode Renstra (2026)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s.d Triwulan I 2025		Persentase Tingkat Capaian	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang	300	20.000.000	0	6.400.000	0,00	32,00
2	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang	300	6.500.000	0	-	0,00	0,00
3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	30	73.499.719	0	4.166.250	0,00	5,67
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30 Orang	30	73.499.719	0	4.166.250	0,00	5,67

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program sosial, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa isu penting yang perlu diperhatikan adalah :

1. Belum Optimalnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender

Upaya pembangunan dan pengarusutamaan gender (PUG) masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi kelembagaan, perencanaan, maupun implementasi di lapangan. Masih terdapat kesenjangan akses dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial. Indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan capaian yang belum merata antar wilayah maupun kelompok penduduk. Kelembagaan PUG, termasuk kapasitas SDM, komitmen perangkat daerah, serta pelaksanaan Analisis Gender (ARG) dan Gender Budget Statement (GBS), juga belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi ini menyebabkan program-program pembangunan belum sepenuhnya responsif gender dan belum mampu mengatasi ketimpangan yang ada.

2. Belum Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)

Penyelenggaraan Kota Layak Anak memerlukan keterpaduan lintas sektor dan pemenuhan hak anak dalam lima klaster, mulai dari hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus. Meskipun berbagai program sudah dilaksanakan, pemenuhan indikator KLA masih belum mencapai skor optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain ketersediaan data yang belum terintegrasi, sarana dan prasarana ramah anak yang belum merata, masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, serta belum maksimalnya peran masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak. Selain itu, kapasitas

kelembagaan UPTD PPA dan sistem rujukan kasus masih perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif.

3. Belum Optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana
Pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menghadapi tantangan pada aspek akses layanan, kualitas data, dan cakupan peserta KB modern. Perubahan struktur umur penduduk, tingginya persentase usia produktif, serta masih adanya disparitas angka kelahiran menurut wilayah menunjukkan bahwa program KB belum sepenuhnya merata. Pemanfaatan data kependudukan juga belum optimal dalam perencanaan pembangunan, sementara layanan KB masih menghadapi keterbatasan fasilitas, distribusi tenaga, dan ketersediaan alat/obat kontrasepsi. Sosialisasi dan edukasi mengenai keluarga berencana, Generasi Berencana (Genre), dan pengasuhan remaja juga masih perlu diperkuat untuk mengurangi risiko kehamilan tidak diinginkan, pernikahan usia anak, serta persoalan kesehatan reproduksi remaja.

4. Belum Optimalnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting

Upaya percepatan penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas OPD, namun implementasi di tingkat lapangan masih belum konsisten. Identifikasi keluarga risiko stunting, pendampingan oleh TPPS, intervensi spesifik dan sensitif, serta pelaporan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian keluarga masih kesulitan mengakses layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, pendidikan pengasuhan, serta layanan KB pascapersalinan. Selain itu, pemanfaatan data keluarga risiko stunting melalui SIGA, atau aplikasi pendukung lainnya belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perencanaan dan pemantauan. Kondisi ini menyebabkan penanganan tidak selalu tepat sasaran dan capaian prevalensi stunting bergerak lambat menuju target.

5. Belum Optimalnya akses layanan sosial bagi PPKS

Cakupan dan kualitas layanan sosial bagi PPKS seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, fakir miskin, dan kelompok rentan lainnya masih belum memenuhi kebutuhan di lapangan. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan data

PPKS yang mutakhir dan terintegrasi, minimnya jejaring layanan dengan lembaga non-pemerintah, serta keterbatasan sumber daya manusia pekerja sosial, TKSK, dan relawan lainnya. Sarana layanan seperti rumah singgah, balai rehabilitasi, dan layanan berbasis komunitas masih belum memadai, sehingga tidak seluruh PPKS mendapatkan layanan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan penanganan masalah sosial tidak selalu efektif, dan risiko kerentanan sosial tetap tinggi di masyarakat

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ialah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Reviu RKPD-P sebagai salah satu bentuk quality assurance sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan. Diharapkan dengan adanya Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah dapat meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

Reviu dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas kesesuaian informasi dalam rencana kerja Perangkat Daerah Perubahan dengan informasi dalam Perubahan RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.

Reviu terhadap RKPD 2025 Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja sasaran dan program dalam RKPD telah sesuai dengan Renstra PD
2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pencantuman indicator program kegiatan dan target dalam RKPD telah sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri teknis yang terkait yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program pada RKPD
5. Program prioritas pembangunan pada RKPD di dasarkan pada hasil identifikasi permasalahan.
6. Program prioritas pembangunan pada RKPD di dasarkan pada isu strategis dan permasalahan.

Tabel. 2.5
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11.277.064.339	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11.277.064.339	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8.144.871.133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				8.144.871.133	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	100 Persen	5.797.603.212	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	100 Persen	5.797.603.212	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.675.865.490	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.675.865.490	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	4.675.865.490	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	4.675.865.490	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	154.313.392	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	154.313.392	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5.391.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5.391.700	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	11.520.170	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	11.520.170	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.645.522	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.645.522	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	94.756.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	94.756.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	27.429.540,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	27.429.540,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	27.429.540,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	27.429.540,00	
			Plank nama UPTD PPA Mesin potong rumput laptop printer mesin scanner				Plank nama UPTD PPA Mesin potong rumput laptop printer mesin scanner			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	688.164.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	688.164.840	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	43.244.840	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	43.244.840	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	644.920.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	644.920.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah kondisi baik	100 Persen	251.829.950	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah kondisi baik	100 Persen	251.829.950	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	121.830.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	121.830.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	59.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	59.200.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	20.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	20.800.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	49.999.950	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	49.999.950	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 Persen	1.050.460.050	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 Persen	1.050.460.050	
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 Persen				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 Persen		
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 Persen				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 Persen		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	60 Lembaga	1.050.460.050	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	60 Lembaga	1.050.460.050	
		Persentase lembaga sosial yang aktif	100 Persen				Persentase lembaga sosial yang aktif	100 Persen		
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	273.860.300	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	273.860.300	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2.850.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2.850.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	683.206.150	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	683.206.150	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat	90.543.600	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat	90.543.600	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS yang tertangani	90 Persen	1.015.300.584	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS yang tertangani	90 Persen	1.015.300.584	
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 persen				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 persen		
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 persen				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 persen		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 persen				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 persen		

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
		Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi	100 persen				Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi	100 persen		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 persen				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 persen		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	660.942.450	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	660.942.450	
			750 Orang					750 Orang		
Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	488.018.450	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	488.018.450	
Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	98.365.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	98.365.000	
Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	35.186.000	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	35.186.000	
			0					0		
Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.974.000	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.974.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.399.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.399.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 Orang	354.358.134	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 Orang	354.358.134	
			2792 orang					2792 orang		
Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	47.300.000	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	47.300.000	
Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	44.000.000	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	44.000.000	
Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	7.500.000	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	7.500.000	
Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	166.756.330	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	166.756.330	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	88.801.804	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	88.801.804	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	8797 Persen	75.977.750	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	8797 Persen	75.977.750	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 Layanan	75.977.750	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 Layanan	75.977.750	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 orang	12.509.900	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 orang	12.509.900	
			lap top komputer printer					lap top komputer printer		
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	63.467.850	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	63.467.850	
			0					0		
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	-	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang tertangani	100 Persen	90.912.037	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang tertangani	100 Persen	90.912.037	
		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100		
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	7				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	7		
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100		
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	7				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	7		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan makanan sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 persen	14.543.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan makanan sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 persen	14.543.000	
		Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 persen				Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 persen		
Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	-	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	-	
Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	13.100.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	13.100.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1.443.000	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1.443.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 orang	76.369.037	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 orang	76.369.037	
Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	76.369.037	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	76.369.037	
		Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	1 Unit				Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	1 Unit		
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang dipelihara	100 Persen	114.617.500	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang dipelihara	100 Persen	114.617.500	
		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100 Persen				Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100 Persen		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	114.617.500	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	114.617.500	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	114.617.500	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	114.617.500	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				819.014.141	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				819.014.141	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi perempuan yang aktif	100 Persen	263.940.400	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi perempuan yang aktif	100 Persen	263.940.400	
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Persen				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Persen		
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	7				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	7		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	66.33				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	66.33		
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	33.368.100	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	33.368.100	
		Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD				Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD		
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Perangkat Daerah	33.368.100	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Perangkat Daerah	33.368.100	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 Persen	-	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 Persen	-	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	26 Lembaga	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik Hukum Sosial dan Ekonomi		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	26 Lembaga	-	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen	230.572.300	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen	230.572.300	
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	230.572.300	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	230.572.300	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	147.632.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	147.632.000	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	26.17				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	26.17		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	50.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	50.000.000	
		Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan	10 kasus				Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan	10 kasus		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	68.587.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	68.587.000	
		Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	6 lembaga				Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	6 lembaga		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	68.587.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	68.587.000	
		tersedianya sarana dan prasarana penunjang UPTD PPA dalam pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan	0				tersedianya sarana dan prasarana penunjang UPTD PPA dalam pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan	0		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	10 Layanan	29.045.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	10 Layanan	29.045.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	29.045.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	29.045.000	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	-	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	-	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 Persen	86.291.041	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 Persen	86.291.041	
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,53				Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,53		
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Pemenuhan Hak Anak Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	35 Lembaga	26.310.400	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Pemenuhan Hak Anak Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	35 Lembaga	26.310.400	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	26.310.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	26.310.400	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase forum anak aktif	70 Persen	59.980.641	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase forum anak aktif	70 Persen	59.980.641	
		Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	100 Persen				Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	100 Persen		
		Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100 Persen				Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100 Persen		
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	59.980.641	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	59.980.641	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	321.150.700	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	321.150.700	
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100		
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	86,15				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	86,15		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100 persen	103.224.800	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100 persen	103.224.800	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	57.000.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	57.000.000	
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokuman	46.224.800	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokuman	46.224.800	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	177.950.900	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	177.950.900	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	7.810.900	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	7.810.900	
			0					0		
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	170.140.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	170.140.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	39.975.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	39.975.000	
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			-	39.975.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			-	39.975.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.313.179.065	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.313.179.065	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 Persen	73.344.600	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 Persen	73.344.600	
		Rata-rata jumlah anak per- keluarga	2,43 orang / keluarga				Rata-rata jumlah anak per- keluarga	2,43 orang / keluarga		
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 dokumen	7.358.800	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 dokumen	7.358.800	
		Jumlah regulasi yang dihasilkan	1 dokumen				Jumlah regulasi yang dihasilkan	1 dokumen		
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	25 Kegiatan	7.358.800	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	25 Kegiatan	7.358.800	
Sosialisasi tentang Pemanfaatan kajian tentang dampak kependudukan beserta model solusi strategi sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan.		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Organisasi		Sosialisasi tentang Pemanfaatan kajian tentang dampak kependudukan beserta model solusi strategi sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan.		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Organisasi		
Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Non Formal dan Informal		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Non Formal dan Informal	20 Satuan Pendidikan		Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Non Formal dan Informal		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Non Formal dan Informal	20 Satuan Pendidikan		
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 unit	65.985.800	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 unit	65.985.800	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	19.200.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	19.200.000	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	24.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	24.000.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	22.785.800	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	22.785.800	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase CPR	65 Persen	1.005.030.465	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase CPR	65 Persen	1.005.030.465	
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	57%				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	57%		
		Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	20,41				Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	20,41		
		Rasio akseptor KB	58,5				Rasio akseptor KB	58,5		
Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2450	428.975.465	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2450	428.975.465	
Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	60.000.000	Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	60.000.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			-	97.997.465	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			-	97.997.465	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)			-	40.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)			-	40.000.000	
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			-	125.000.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			-	125.000.000	
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			-	-	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			-	-	
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			-	105.978.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			-	105.978.000	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB Kader IMP yang dibina	99 orang	344.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB Kader IMP yang dibina	99 orang	344.000.000	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	88 Orang	128.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	88 Orang	128.000.000	
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi	216.000.000	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi	216.000.000	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			-	127.940.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			-	127.940.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			-	7.184.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			-	7.184.000	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			-	103.659.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			-	103.659.000	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			-	-	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			-	-	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			-	17.097.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			-	17.097.000	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50 persen	104.115.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50 persen	104.115.000	
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	14.515.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	14.515.000	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			-	13.300.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			-	13.300.000	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			-	76.300.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			-	76.300.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 Persen	1.234.804.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65 Persen	1.234.804.000	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 kelompok	775.558.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 kelompok	775.558.000	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	74.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat Generasi Berencana Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	74.000.000	
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				9.598.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				9.598.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Review Perubahan RKPD Tahun 2025		Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKBBKRKBKLPPKSPIK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	223 kader	561.960.000	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKBBKRKBKLPPKSPIK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	223 kader	561.960.000	
Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksana/Kader Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	4 laporan		Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksana/Kader Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	4 laporan		
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKRKBKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKRKBKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 unit	130.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKRKBKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKRKBKL PPKS PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 unit	130.000.000	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100 Persen	459.246.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100 Persen	459.246.000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Organisasi	185.666.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Organisasi	185.666.000	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	9.580.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	9.580.000	
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUSIbu Hamil Pasca salin/kelahiranBaduta/Balita)			-	120.000.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUSIbu Hamil Pasca salin/kelahiranBaduta/Balita)			-	120.000.000	
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu HamilPasca salin/kelahiran Baduta/Balita)			-	144.000.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS Ibu HamilPasca salin/kelahiran Baduta/Balita)			-	144.000.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pada Musrenbang Perubahan RKPD tidak adanya usulan musrenbang yang ditujukan kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dan terdapat 12 Pokok Pikiran Anggota Dewan DPRD Kota Padang Panjang yang telah diakomodir pada tahun 2025. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.6
Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku
kepentingan Tahun 2025 Kota Padang Panjang

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL					
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan					
1		JL. SYECH M JAMIL RT 5 KELURAHAN KOTO PANJANG, Kota Padang Panjang	Persentase PPKS yang tertangani	1 Orang	15.000.000	
2		KAMPUNG TELENG NO 35 RT 12 KEL KAMPUNG MANGGIS, Kota Padang Panjang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	1 Orang	17.450.000	
3		jl. anas karim sungai andok, RT.006, kel, kamoung manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	7.499.995	
4		Jl. H. Sumanik RT.1 Kel. Ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
5		Bukit kandung RT.9, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
6		Solok batuang RT.9 kel. Sigando, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.250.000	

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
7		Jl/ Muchtar Luthfi No.25 RT.11 Kel. Ngatau, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
8		Jl. Syech Ibrahim Musa RT.2 kel. ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
9		Bukit Kandung RT.9 kel. ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
10		tabek gadang RT.8 Kel. Ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
11		Jl. Syech Ibrahim Musa No.31 RT.2 Kel. Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif			
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina			
12	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	40.000.000	
	JUMLAH				216.199.995	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025–2030 berpedoman pada arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030. Kebijakan nasional tersebut menempatkan pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, serta perlindungan sosial sebagai prioritas utama dalam mewujudkan *Indonesia Emas 2045*. Dalam kerangka tersebut, terdapat beberapa agenda nasional yang menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya bidang sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yaitu:

1. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial Nasional

Kebijakan nasional menekankan pentingnya reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Hal ini meliputi pemutakhiran data kemiskinan dan kerentanan sosial melalui PPKS, peningkatan efektivitas bantuan sosial, serta perluasan akses layanan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan korban kekerasan. Bagi Kota Padang Panjang, kebijakan ini menjadi landasan dalam meningkatkan cakupan dan kualitas layanan sosial, serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial

2. Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga

Dalam RPJMN 2025–2030, kebijakan pengendalian penduduk diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, serta mewujudkan keluarga yang

berkualitas. Pemerintah nasional mendorong pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), peningkatan ketahanan keluarga, dan penanganan keluarga berisiko stunting. Kota Padang Panjang mengadaptasi kebijakan ini melalui penguatan pelayanan KB, pembinaan pasangan usia subur, edukasi kesehatan reproduksi remaja, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan keluarga yang berketahanan, bahagia, dan produktif.

3. **Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
Pemerintah pusat menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan untuk menghapus ketimpangan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penguatan kelembagaan PUG, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, dan pendidikan, serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Kebijakan nasional tersebut menjadi acuan bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam memperluas partisipasi perempuan di bidang publik, meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan, serta memperkuat mekanisme layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender.
4. **Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak**
RPJMN menekankan pentingnya pembangunan anak sebagai investasi masa depan bangsa melalui penguatan sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Kota Padang Panjang mengadopsi kebijakan ini dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas layanan ramah anak, serta memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
5. **Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan**
Kebijakan nasional juga menekankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menindaklanjuti kebijakan ini melalui peningkatan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), penguatan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis elektronik, serta peningkatan

kompetensi aparaturnya dalam pelayanan publik yang responsif gender dan inklusif

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya untuk:

- Meningkatkan efektivitas perlindungan sosial bagi masyarakat rentan,
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat ketahanan keluarga,
- Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
- Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, serta
- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas

Dengan keselarasan terhadap kebijakan nasional tersebut, arah pembangunan sosial di Kota Padang Panjang diharapkan mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2025 - 2030.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun Dinas Sosial

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2025 - 2030, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2026. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2030.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sesuai Rencana Strategis tahun 2025 – 2030 yang ditetapkan yaitu dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2030

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
S1.3 Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70	71	72	73	74	75	
S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	66,56	66,66	66,76	66,86	66,96	67,06	
S3.1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,25	98,35	98,45	98,5	98,6	98,65	
S4.3 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat			Angka PPKS	3.34	3.21	3.1	2.9	2.75	2.5	
			Indeks Kesejahteraan Sosial	66,33	67,56	68,17	69,55	70,33	72,59	
			Jumlah penduduk miskin	3060	2714	2368	2023	1671	1325	
		Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Predikat PPE	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	
		Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,34	
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	6,1	6,08	6,06	6,04	6,02	6	
		Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	75	76	77	78	79	80	
		Meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.00	70.50	71,5	72	74,5	75	
		Meningkatkan akses layanan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	97,5	98	98,5	99	99,5	100	

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sesuai Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 yang ditetapkan yaitu : Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap Masyarakat, dengan indikator dan target perubahan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA) , dengan target pada angka 70
2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) , dengan target pada angka 66,56
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) , dengan target pada angka 98,25
4. Jumlah penduduk miskin, dengan target 3060 orang ribu
5. Angka PPKS, dengan target pada angka 70
6. Indeks Kesejahteraan Sosial, dengan target pada indeks 66,33

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun 2025 - 2029, untuk mendukung capaian tujuan perangkat daerah ditetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender, dengan indikator Predikat Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE) dan target pada indeks Pratama;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak , dengan indikator Tingkat Capaian Kota Layak Anak dan target pada prediket Nindya;
3. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, dengan indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) target pada angka 2,39 dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) target pada angka 6,1;
4. Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting, dengan indikator Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan dan target 75 %;
5. Meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan target pada angka 70 ;

6. Meningkatnya Layanan sosial bagi PPKS, dengan indikator Persentase PPKS yang tertangani dan target 97,5 %.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial melakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Perubahan ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, perubahan regulasi, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan sosial. Berdasarkan hasil evaluasi internal, ditemukan bahwa beberapa tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan isu sosial. Selain itu, adanya kebijakan nasional terkait penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, disabilitas, lansia, dan perlindungan anak, menuntut perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan.

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran Dinas Sosial disempurnakan agar lebih terukur, relevan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional. Perubahan tujuan difokuskan pada orientasi peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, bukan hanya penyediaan layanan dasar. Perubahan tujuan dan sasaran dari perencanaan yang sebelumnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran

Sebelum				Sesudah			
No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan	Persentase PPKS yang tertangani	97%	1	Meningkatnya layanan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	97,5
2	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	87	2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya
3	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE	Nindya	3	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)	Pratama

Sebelum				Sesudah			
No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,3	4	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,39
						Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	6,1
5	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kelahiran	74,0%	5	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	75
				6	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70

Dalam rangka memperkuat arah pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan, dan keluarga berencana, dilakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi capaian kinerja sebelumnya, penyesuaian terhadap kebijakan nasional, serta kebutuhan untuk menghasilkan ukuran kinerja yang lebih relevan, terukur, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Penyesuaian Sasaran Layanan Sosial bagi PPKS

Sebelumnya, sasaran *“Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan”* difokuskan pada jumlah penerima layanan. Pada perubahan sasaran, orientasi diperluas menjadi *“Meningkatnya layanan sosial bagi PPKS”* yang menekankan kualitas dan keberlanjutan layanan. Indikator tetap menggunakan persentase PPKS tertangani, namun target ditingkatkan dari 97% menjadi 97,5%, mencerminkan komitmen peningkatan efektivitas layanan.

Penyesuaian Sasaran Pemenuhan Hak Anak

Sasaran “*Meningkatkan pemenuhan hak anak*” mengalami penajaman indikator. Awalnya indikator menggunakan *Persentase indikator KLA yang terpenuhi*, kini disempurnakan menggunakan indikator *Tingkat Capaian Kota Layak Anak* yang mengacu pada standar nasional. Target meningkat dari pemenuhan indikator menjadi pencapaian KLA kategori NINDYA, sehingga lebih sesuai dengan arah kebijakan perlindungan anak.

Penajaman Sasaran Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Sebelumnya, sasaran diberi judul “*Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak*” dengan indikator *Predikat APE*. Setelah perubahan, sasaran diperjelas menjadi “*Meningkatnya upaya pembangunan dan kesetaraan gender*”, yang menekankan aspek pengarusutamaan gender. Indikator disesuaikan menjadi *Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)* dengan target Pratama, sesuai regulasi terbaru tentang evaluasi PUG. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional terkait evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), indikator kinerja *Anugerah Parahita Ekapraya (APE)* mengalami perubahan nomenklatur menjadi *Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)*. Perubahan ini dilakukan karena pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan penyesuaian terminologi dan tata penilaian untuk memperkuat akurasi pengukuran capaian kinerja PUG di daerah.

Indikator APE yang sebelumnya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan kini diperbarui menjadi PPE untuk mencerminkan cakupan penilaian yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek pemberdayaan perempuan, tetapi juga menyangkut integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, dan pelayanan publik. Pergeseran istilah ini sekaligus menekankan bahwa penilaian tidak sekadar fokus pada penghargaan, tetapi pada peningkatan kualitas implementasi PUG secara nyata dan berkelanjutan.

Perubahan indikator ini bertujuan untuk:

- 1) Menyeragamkan indikator daerah dengan standar nasional yang berlaku saat ini.
- 2) Meningkatkan ketepatan pengukuran kinerja, terutama terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender.

- 3) Memperkuat akuntabilitas kinerja OPD, karena PPE mencakup aspek kelembagaan, pelaksanaan, serta keberlanjutan PUG.
- 4) Memberikan gambaran capaian yang lebih jelas terhadap upaya kesetaraan gender di daerah.

Perubahan Sasaran Pelayanan Kependudukan dan KB

Sasaran “*Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana*” tetap dipertahankan namun indikator kinerja diperbarui agar sesuai standar indikator nasional (BKKBN). Indikator sebelumnya menggunakan *Rata-rata jumlah anak per keluarga*, kini diganti menjadi:

- 1) Angka Kelahiran Total (TFR) dengan target 2,39
- 2) Angka Kelahiran Remaja 15–19 tahun (ASFR) dengan target 6,1

Perubahan ini memperkuat relevansi pengukuran kinerja sesuai indikator demografi yang diakui secara nasional.

TFR adalah Angka Kelahiran Total, yaitu rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15–49 tahun) apabila pola fertilitas pada tahun tertentu tetap sama. ASFR adalah Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur, yaitu jumlah kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu dalam usia reproduksi (misal 15–19 tahun, 20–24 tahun, dst.).

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk mendukung pembangunan serta untuk memenuhi target SPM dan IKK pada Tahun 2025, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melaksanakan Program dan Kegiatan perubahan sesuai dengan

urusan wajib yang diemban, sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Rekap Jumlah Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
1	Jumlah Program	13	13	13
2	Jumlah Kegiatan	31	31	31
3	Jumlah Sub Kegiatan	59	75	70

Jumlah Program di RKPD Perubahan Tahun 2025 sebanyak 13 prorgam sesuai dengan jumlah pada APBD serta RKPD Perubahan Tahun 2025. Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan 2025 sebanyak 31 kegiatan sedangkan pada APBD dan RKPD Perubahan 2025 ada 31 kegiatan. Begitu juga dengan jumlah sub kegiatan pada RKPD 2025 sebanyak 59 sub kegitaan pada APBD berkurang menjadi 75 sub kegiatan dan pada RKPD Perubahan 2025 berkurang lagi menjasi 70 sub kegiatan. Terjadi pengurangan jumlah pada kegiatan dan sub kegiatan, hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang di akomodir oleh dana DAK dan juga dikarenakan efisiensi anggaran atau refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dihilangkan dari rencana RKPD awal tahun 2025.

Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 beserta prognosisnya yang terdapat pada Renja sipd-ri.kemedagri.go.id dapat dilihat pada **tabel di bawah ini :**

Tabel 3.3
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						11.468.551.090	12.602.173.454	11.277.064.339								9.392.184.781				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.325.682.090	9.128.626.643	8.144.871.133								6.795.533.781				
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						9.325.682.090	9.128.626.643	8.144.871.133								6.795.533.781				
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				100 %	100 %	6.568.934.322	6.464.715.625	5.797.603.212							5.166.969.762				
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	'Persentase pelayanan keuangan perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	5.179.297.765	5.115.796.725	5.115.796.725			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		4.055.930.882	DSPPKBP 3A			
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				560 Orang/bulan	560 Orang/bulan	5.179.297.765	5.115.796.725	4.675.865.490	Pagang Panjang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorient			4.055.930.882	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		asi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-			100 persen	100 persen	336.075.545	287.592.235	287.592.235			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-			327.916.200	DSPPKBP 3A	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	5.391.700	5.391.700	5.391.700	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi				5.391.700	DSPPKBP 3A	

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																			Pelayan an Akuntab el Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif							
	1	0 6	0 1	2. 06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	73.159.345	73.132.145	42.645.522	Pagang Panjan g	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Meningk atkan kinerja penyelen ggaraan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif			65.000.000	DSPPKBP 3A			
	1	0 6	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.499.500	20.013.390	11.520.170	Pagang Panjan g	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Meningk atkan kinerja penyelen ggaraan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan			24.499.500	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																			an Akuntab el Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif							
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Lapora n	233.025.000	189.055.000	94.756.000	Pagang Panjan g	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Meningk atkan kinerja penyeleng garaan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif			233.025.000	DSPPKBP 3A			
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan "Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-			100 persen	100 persen	110.000.000	38.742.100	38.742.100			-	Meningk atkan kinerja penyeleng garaan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el	-		50.000.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																		Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif								
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	13 Unit	110.000.000	38.742.100	27.429.540	Pagang Panjang g	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50.000.000	DSPPKBP 3A			
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 persen	100 persen	522.181.680	758.893.165	758.893.165			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis	-		522.181.680	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et		Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		s Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	53.893.680	47.893.165	43.244.840	Pagang Panjang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			53.893.680	DSPPKBP 3A		
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	468.288.000	711.000.000	644.920.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis			468.288.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		s Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	-			100 persen	100 persen	421.379.332	263.691.400	263.691.400			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		210.941.000	DSPPKBP 3A		
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	256.379.332	125.685.600	121.830.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan			111.525.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																			Kolaboratif							
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	75.000.000	77.205.800	59.200.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35.516.000	DSPPKBP 3A			
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	50.000.000	20.800.000	20.800.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal.			23.900.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et		Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
																		Adaptif dan Kolaboratif									
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				6 Unit	6 Unit	40.000.000	40.000.000	49.999.950	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000	DSPPKBP 3A				
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan				80 %	100% % % %	1.299.684.600	1.210.700.100	1.050.460.050							378.319.700					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar																		
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibangun Persentase lembaga sosial yang aktif	-			148 lembaga	100 persen 148 lembaga	1.299.684.600	1.210.700.100	1.210.700.100			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-			378.319.700	DSPPKBP 3A	
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				92 Orang	92 Orang	297.222.800	315.404.300	273.860.300	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel				267.222.800	DSPPKBP 3A	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																		Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif								
	1	0 6	0 2	2. 03	00 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/K ota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/K ota				2 Orang	2 Orang	8.650.000	5.700.000	2.850.000	Pagang Panjan g	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Meningk atkan kinerja penyelen ggaraan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif			8.640.000	DSPPKBP 3A			
	1	0 6	0 2	2. 03	00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Lembaga Kesejahteraa n Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/K ota				60 Lembaga	60 Lemba ga	900.000.000	791.207.500	683.206.150	Pagang Panjan g	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Meningk atkan kinerja penyelen ggaraan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el Kompete			8.640.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																			n Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																				
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Sertifikat	5 Sertifikat	93.811.800	98.388.300	90.543.600	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			93.816.900	DSPPKBP 3A			
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Persentase PPKS yang tertangani undefined				90 %	100 100 90 undefined % % undefined	1.049.911.249	1.079.811.249	1.015.300.584							873.711.400				
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas terlantar,	-			750 orang	750 orang	676.199.545	646.099.545	646.099.545			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan	null		500.000.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti											garaan pemerintah anah daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan an Akuntabel Kompeten Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolaboratif								
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				459 Orang	459 Orang	376.199.545	376.199.545	488.018.450	Pagang Panjang	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan an Akuntabel Kompeten Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			200.000.000	DSPPKBP 3A			
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																				
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan				75 Orang	75 Orang	150.000.000	150.000.000	98.365.000	Pagang Panjang	PENDA PATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan			150.000.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)					
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025							Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8		9	10		11		12		13	14	15	16		17		18	19		20
							Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota													H (PAD)			pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	22 Orang	80.000.000	55.900.000	35.186.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							80.000.000	DSPPKBP 3A			
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																								
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				50 Orang	50 Orang	50.000.000	44.000.000	28.974.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan							50.000.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Kewenangan Kabupaten/Kota												ahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif						
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																			
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	20.000.000	20.000.000	10.399.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				20.000.000	DSPPKBP 3A	
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	-			2710 orang	2710 orang	373.711.704	433.711.704	433.711.704			-	Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan daerah yang	-			373.711.400	DSPPKBP 3A	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial												BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif								
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan																				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	75.000.000	55.000.000	47.300.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			75.000.000	DSPPKBP 3A			
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang																				
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan				75 Orang	75 Orang	75.000.000	55.000.000	44.000.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKH			75.000.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025					Nasional	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Kabupaten/Kota											LAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif								
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu																				
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	10.000.000	10.000.000	7.500.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			10.000.000	DSPPKBP 3A			
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																				
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	120.000.000	220.000.000	166.756.330	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK			120.000.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et		Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									Nasional	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
																		Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif									
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	93.711.704	93.711.704	88.801.804	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			93.711.400	DSPPKBP 3A				
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan				87,97 %	50 87,97 % % %	228.648.600	221.614.050	75.977.750							228.029.600					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							perlindungan dan jaminan sosial Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar																			
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota undefined	-			17 layanan	17 layanan undefined undefined	228.648.600	221.614.050	221.614.050			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		228.029.600	DSPPKBP 3A			
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				2119 Orang	2119 Orang	79.939.000	79.895.000	12.509.900	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten			79.320.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)			
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025							Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13	14	15	16	17		18	19		20
																						Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif						
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																						
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1271 Keluarga	1271 Keluarga	133.709.600	133.709.600	63.467.850	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif					133.709.600		DSPPKBP 3A		
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																						
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Orang	130 Orang	15.000.000	8.009.450	0	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis					15.000.000		DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et		Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
																			s Loyal, Adaptif dan Kolaboratif								
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana				100 %	100 100 % %	153.503.319	99.999.719	90.912.037							123.503.319					
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	-			100 persen	100 persen	50.000.000	26.500.000	26.500.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		50.000.000	DSPPKBP 3A				
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	30.000.000	20.000.000	13.100.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000	DSPPKBP 3A		
	1	06	06	201	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																			
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	20.000.000	6.500.000	1.443.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	-			30 orang	30 orang	103.503.319	73.499.719	73.499.719			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		73.503.319	DSPPKBP 3A		
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																			
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	103.503.319	73.499.719	76.369.037	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			73.503.319	DSPPKBP 3A		
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN	Persentase TMP yang dipelihara				100 %	100 100 %	25.000.000	51.785.900	114.617.500							25.000.000			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik																		
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara	-			98 Makam	98 Makam	25.000.000	51.785.900	51.785.900			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		25.000.000	DSPPKBP 3A		
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				98 Makam	98 Makam	25.000.000	51.785.900	114.617.500	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis			25.000.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et		Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		s Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.142.869.000	3.473.546.811	3.132.193.206						2.596.651.000				
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							745.869.000	1.124.318.200	819.014.141						711.869.000				
7	2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUN	Persentase organisasi perempuan yang aktif Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD				100 20 %	100 20 %	253.580.000	253.580.000	263.940.400							219.580.000			
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	-			23 OPD	23 OPD	74.000.000	74.000.000	74.000.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		40.000.000	DSPPKBP 3A		
	2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																			
						Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota					23 Orang	23 Orang	74.000.000	74.000.000	33.368.100	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang			40.000.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						Nasional			Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kabupaten/kota	-			50 Persen	50 Persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000			-	Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		30.000.000	DSPPKBP 3A		
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																			
							Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi				26 Lembaga	0 Lembaga	30.000.000	30.000.000	0	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan daerah yang BerAKH LAK Berorient			30.000.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi												asi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibentuk lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	-			100 persen 26 Organisasi	100 persen 26 Organisasi	149.580.000	149.580.000	149.580.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-			149.580.000	DSPPKBP 3A		
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				15 Dokumen	15 Dokumen	149.580.000	149.580.000	230.572.300	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan				149.580.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et		Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
																		Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif									
8	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu				100 BTJ	100 100 % BTJ	149.532.000	202.390.300	147.632.000							149.532.000					
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	-			8 Lembaga	8 Lembaga	30.000.000	68.345.300	68.345.300			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif	-		30.000.000	DSPPKBP 3A				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																		dan Kolaboratif								
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	68.345.300	50.000.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000	DSPPKBP 3A			
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	-			100 Porsi	100 Porsi	104.502.000	95.000.000	95.000.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan	-		104.502.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																		Kolaboratif								
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Layanan	3 Layanan	104.502.000	95.000.000	68.587.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			104.502.000	DSPPKBP 3A			
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota Jumlah produk hukum yang diterbitkan lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	-			100 Persen 10 layanan 1 Dokumen	100 Persen 10 layanan 1 Dokumen	15.030.000	39.045.000	39.045.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan	-		15.030.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et		Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
																		Kolaboratif									
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
							Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	3 Orang	0	29.045.000	29.045.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0	DSPPKBP 3A				
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																					
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	15.030.000	10.000.000	0	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten			15.030.000	DSPPKBP 3A				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																			Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolaboratif						
9	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi				83 %	83 %	120.620.000	270.375.600	86.291.041							120.620.000			
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	-			35 Lembaga	35 Lembaga	43.855.000	135.587.400	135.587.400			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		43.855.000	DSPPKBP 3A		
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Dokumen	2 Dokumen	43.855.000	135.587.400	26.310.400	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten			43.855.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		n Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif 2. Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA 3.Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	-			70 Persen	70 Persen	76.765.000	134.788.200	134.788.200			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		76.765.000	DSPPKBP 3A		
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					5 Dokumen	2 Dokumen	76.765.000	134.788.200	59.980.641	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal.			76.765.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																		Adaptif dan Kolabora tif								
10	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)				100 BTJ	100 undefi ned BTJ undefi ned	222.137.000	397.972.300	321.150.700							222.137.000				
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	-			100 persen	100 persen	62.137.000	147.857.300	147.857.300			-	Meningk atkan kinerja penyelen ggaraan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif	-		62.137.000	DSPPKBP 3A			
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																				
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendamping an dalam pelaksanaan				10 Orang	60 Orang	22.137.000	61.500.000	57.000.000	Pagang Panjan g	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Meningk atkan kinerja penyelen ggaraan pemerint ahan			22.137.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA												daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																				
							Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				6 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	86.357.300	46.224.800	Pagang Panjang	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000	DSPPKBP 3A			
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	-			100 Persen	100 Persen	160.000.000	210.140.000	210.140.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKH	-		160.000.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025						Nasional
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Kabupaten/Kota												LAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif								
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				12 Orang	5 Orang	40.000.000	25.000.000	7.810.900	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000	DSPPKBP 3A			
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																				
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				12 Layanan	12 Layanan	120.000.000	185.140.000	170.140.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK			120.000.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	-			-	100 Persen	0	39.975.000	39.975.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		0	DSPPKBP 3A		
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																			
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	3 Orang	0	39.975.000	39.975.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan			0	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																		an Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							1.397.000.000	2.349.228.611	2.313.179.065							1.884.782.000			
11	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan				100 %	100 %	53.000.000	85.501.746	73.344.600							30.000.000			
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	-			1 dokumen	1 dokumen	23.000.000	12.302.050	12.302.050			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		0	DSPPKBP 3A		
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																			
						Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di				25 Kegiatan	25 Kegiatan	23.000.000	0	0		Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerint			0	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan												ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan an Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																				
							Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				-	1 Kegiatan	0	12.302.050	7.358.800	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan an Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0	DSPPKBP 3A			
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	-			16 unit	16 unit	30.000.000	73.199.696	73.199.696			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang	-		30.000.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025							Nasional
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
																		BerAKH LAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif									
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																					
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	12 Laporan	0	19.200.000	19.200.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKH LAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0	DSPPKBP 3A				
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																					
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan				-	4 Dokumen	0	24.000.000	24.000.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKH			0	DSPPKBP 3A				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et		Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8		9	10		11		12		13	14	15	16	17		18	19		20
							Pelayanan KB															LAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif							
	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																							
							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				16 Unit	16 Unit	30.000.000	29.999.696	22.785.800	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif						30.000.000	DSPPKBP 3A			
12	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)				65 %	65 undefined % undefined	248.880.000	1.107.417.465	1.005.030.465											356.064.000			
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan	-			2300 orang	2300 orang	55.000.000	477.997.465	477.997.465			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan	-						155.000.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peserta KB Aktif											ggaran pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayanan an Akuntab el Kompet e n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif								
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																				
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	12 Laporan	0	60.000.000	60.000.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKH LAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			60.000.000	DSPPKBP 3A				
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 Laporan	0	97.997.465	97.997.465	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0	DSPPKBP 3A		
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																			
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	12 Laporan	0	40.000.000	40.000.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000	DSPPKBP 3A		
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et		Pagu Indikatif (Rp)			
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	4 Dokumen	0	125.000.000	125.000.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0	DSPPKBP 3A			
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																				
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000	0	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000	DSPPKBP 3A			
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				30 Organisasi	30 Organisasi	15.000.000	115.000.000	105.978.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.000.000	DSPPKBP 3A		
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	-			99 orang	99 orang	137.880.000	355.880.000	355.880.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		137.880.000	DSPPKBP 3A		
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et		Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	94 Orang	0	128.000.000	128.000.000	Pagang Panjang g	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningk atkan kinerja penyelen ggaraan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el Kompet e n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif			0	DSPPKBP 3A				
	2	14	03	202	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																					
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				40 Organisasi	40 Organi sasi	137.880.000	227.880.000	216.000.000	Pagang Panjang g	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Meningk atkan kinerja penyelen ggaraan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el Kompet e n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif.			137.880.000	DSPPKBP 3A				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/K ota	-	-			-	-	0	127.940.000	127.940.000			-	Meningk atkan kinerja penyel en ggaraan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el Kompet e n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif	-		7.184.000	DSPPKBP 3A		
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																			
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					-	1 Lapora n	0	7.184.000	7.184.000	Pagang Panjan g	DAK Non Fisik- BOKB- KB	-	Meningk atkan kinerja penyel en ggaraan pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el Kompet e n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif			7.184.000	DSPPKBP 3A		
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et		Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	25 Orang	0	103.659.000	103.659.000	Pagang Panjang g	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0	DSPPKBP 3A			
	2	14	03	203	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																			0	DSPPKBP 3A
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	12 Laporan	0	17.097.000	17.097.000	Pagang Panjang g	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2	1	0	2.		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	-			54 persen	54 persen	56.000.000	145.600.000	145.600.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		56.000.000	DSPPKBP 3A		
	2	1	0	2.	00	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																			
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				3 Organisasi	3 Organisasi	56.000.000	56.000.000	14.515.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			56.000.000	DSPPKBP 3A		
	2	1	0	2.	00	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				-	12 Dokumen	0	13.300.000	13.300.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0	DSPPKBP 3A		
	2	14	03	204	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																			
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	16 Kampung	0	76.300.000	76.300.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
13	2	1	0	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga				65 %	65 65 % %	1.095.120.000	1.156.309.400	1.234.804.000								1.498.718.000		
	2	1	0	4	2. 01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	-			114 kelompok	114 kelompok	552.560.000	731.558.000	731.558.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		692.158.000	DSPPKBP 3A		
	2	1	0	4	2. 01 00 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																			
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi					3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	30.000.000	74.000.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorient			30.000.000	DSPPKBP 3A		

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025				RKPD Perubahan 2025						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaa n serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)												asi Pelayanan an Akuntabel Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif							
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																				
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	12 Laporan / Dokumen	0	9.598.000	9.598.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif			9.598.000	DSPPKBP 3A			
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																				
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peninnkatan				-	10 Unit	0	130.000.000	130.000.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi			130.000.000	DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Targ et	Pagu Indikatif (Rp)				
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025		APBD 2025			RKPD Perubahan 2025									
1	2					3	4	5	6	7	8		9	10		11		12		13	14	15	16	17	18	19		20
							Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia															Pelayan an Akuntab el Kompet e n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif						
	2	14	04	201	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																						
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				223 Orang	223 Orang	522.560.000	561.960.000	561.960.000	Pagang Panjang	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Meningk atkan kinerja penyel en ggaran pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab el Kompet e n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif				522.560.000	DSPPKBP 3A				
	2	14	04	202		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyaraka tan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembanguna n Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	-			54 persen	54 persen	542.560.000	424.751.400	424.751.400			-	Meningk atkan kinerja penyel en ggaran pemerint ahan daerah yang BerAKH LAK Berorient asi Pelayan an Akuntab	-			806.560.000	DSPPKBP 3A				

No	Kode					Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)					
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8		9	10		11		12		13	14	15	16	17		18	19		20
						Kesejahteraan Keluarga																	el Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif						
	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																							
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					23 Organisasi	23 Organisasi	522.560.000	140.751.400	185.666.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompetensi Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				522.560.000			DSPPKBP 3A			
	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																							
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja					1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	9.580.000	Pagang Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel				20.000.000			DSPPKBP 3A			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Targ et	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																			Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif							
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																				
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			-	12 laporan	0	120.000.000	120.000.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompete n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif			120.000.000	DSPPKBP 3A				
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																				
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			-	12 laporan	0	144.000.000	144.000.000	Pagang Panjang	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompete			144.000.000	DSPPKBP 3A				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan														Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelu m	Sesud ah	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8		9	10		11		12		13	14	15	16	17		18	19		20	
																							n Harmoni s Loyal, Adaptif dan Kolabora tif							
	J U M L A H											11.277.064.339		11.277.064.339		11.277.064.339										9.392.184.781				

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan pencajabaran dari Rencana Strategis yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta subkegiatan pada dokumen rencana kerja ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini sudah melalui tahap-tahap yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi tanggungjawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka menunjang pencapaian pembangunan Kota Padang Panjang.

Pada Tahun Anggaran 2025 Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN Tahun 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam proses pembangunan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi

antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat inikatif sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi regulasi serta ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah tahun anggaran bersangkutan.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, yaitu sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025. Perubahan RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2025;
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melakukan evaluasi pelaksanaan

kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2025 yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis , target program dan kegiatan dapat lebih focus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Padang Panjang, Juni 2025

**Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang**



Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si

Pembina Utama Muda, NIP. 19690120 198902 1 001